

IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN TEMUKAN, OBATI SAMPAI SEMBUH PENDERITA TUBERKULOSIS (TOSS-TB) DI PUSKESMAS SELABATU KOTA SUKABUMI

IMPLEMENTATION OF THE SERVICE PROGRAM TO FIND, TREAT UNTIL CURED TUBERCULOSIS SUFFERERS (TOSS-TB) AT THE SELABATU HEALTH CENTER, SUKABUMI CITY

Annisa Nurzannah, Dian Purwanti, Tuah Nur

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Jl. R. Syamsudin, SH. No.50, Cikole, Kec.Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43113
annisanurzannah90@gmail.com

disubmit: 16 Mei 2023, direvisi: 16 Juni 2023, diterima: 28 Juni 2023

ABSTRAK

Pada tahun 2022 Kota Sukabumi mengalami kenaikan kasus TB yang cukup signifikan dari 1.256 menjadi 1.602 kasus. Selain itu, masih terdapat stigma negatif dari masyarakat terhadap TB dan penderitanya. Untuk menanggulangi kasus TB, Pemerintah Kota Sukabumi telah berupaya dengan melaksanakan kebijakan penanggulangan TB melalui program Temukan, Obati Sampai Sembuh Penderita Tuberkulosis (TOSS-TB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program TOSS-TB dari pencegahan sampai penyembuhan di Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi dengan proses penelitian yang dilakukan mengacu pada teori implementasi kebijakan dengan indikator ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik *purposive sampling* dengan jumlah responden sebanyak enam informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program TOSS-TB di wilayah Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi belum cukup sesuai pada semua indikator yaitu: ketepatan kebijakan, pelaksanaan, target, lingkungan, dan proses. Disarankan pelaksanaan implementasi program TOSS-TB perlu meningkatkan kerja sama dengan *stakeholder* dan optimalisasi informasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai TB, penderita TB, dan penanggulangannya melalui media massa.

Kata kunci: Efektifitas Implementasi, Tuberkulosis, Program TOSS-TB, Puskesmas Selabatu Sukabumi

ABSTRACT

In 2022, the city of Sukabumi experienced a significant increase in tuberculosis (TB) cases, rising from 1,256 to 1,602 cases. Furthermore, there is still a negative stigma from the community towards TB and its patients. To address the TB cases, the Sukabumi City Government has made efforts by implementing the TB control policy through the Find, Treat, and Cure Tuberculosis Patients (TOSS-TB) program. This research aims to determine the implementation of the TOSS-TB Program from prevention to cure at the Selabatu Community Health Center in Sukabumi City, using a research process guided by policy implementation theory with indicators of policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, environmental accuracy, and process accuracy. The research adopts a descriptive qualitative method with purposive sampling technique, involving six informants as respondents. The research findings indicate that the implementation of the TOSS-TB program in the Selabatu Community Health Center area in Sukabumi City is not fully aligned with all indicators, including policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, environmental accuracy, and process accuracy. It is recommended to enhance the implementation of the TOSS-TB program by improving collaboration with stakeholders and optimizing information and public awareness through mass media about TB, TB patients, and its control.

Keywords: *Effectiveness of Implementation, Tuberculosis, TOSS-TB Program, Puskesmas Selabatu Sukabumi*

PENDAHULUAN

Tuberkulosis (TB) merupakan kategori penyakit menular dan menjadi penyebab utama tingginya jumlah kesakitan bahkan sampai kematian di seluruh dunia sebelum virus COVID-19 melanda. Penyakit tersebut menginfeksi tubuh terutama bagian paru-paru yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Jumlah pasien TB terus meningkat pesat hingga seperempat populasi penduduk di seluruh dunia terinfeksi oleh penyakit ini (Friedland et al., 2017). Indonesia menjadi salah satu negara yang berada di peringkat ke-3 dengan kasus TB tertinggi setelah negara India dan China (Adhanom, 2021). Jumlah kasus tertinggi dilaporkan dari provinsi dengan jumlah penduduk yang besar yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kasus TB di ketiga provinsi tersebut menyumbang angka sebesar 44% dari jumlah seluruh kasus TB di Indonesia. Kota Sukabumi merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kasus TB cukup tinggi.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan kota Sukabumi, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ditemukan bahwa kasus penyakit TB di Kota Sukabumi terus mengalami kenaikan dengan jumlah TB pada tahun 2020 sebanyak 1.218 kasus, kemudian di tahun 2021 tercatat sebanyak 1.256 kasus dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebanyak 1.602 kasus (Muhammad, 2022). Kenaikan kasus TB di

Kota Sukabumi diakibatkan karena masih banyaknya masyarakat yang telah terindikasi TB tidak mematuhi proses pengobatan yang telah diberikan. Ketika terindikasi TB timbul rasa takut dan malu karena merasa akan menerima stigma negatif dari masyarakat yang berdampak kepada psikis dari pasien TB itu sendiri. Selain itu, terdapat sikap merahasiakan riwayat penyakit penderita TB kepada masyarakat yang berdampak kepada mudahnya penularan yang dilakukan karena ketidaktahuan masyarakat menjadikan mereka tidak melakukan pencegahan penularan dengan baik, yang akhirnya membuat kasus TB di Kota Sukabumi masih meningkat hingga saat ini dengan masih adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap penyakit TB.

Untuk menanggulangi peningkatan kasus TB di Kota Sukabumi, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi melaksanakan program pelayanan yang dibuat oleh Kemenkes RI yaitu program Temukan, Obati Sampai Sembuh Penderita Tuberkulosis (TOSS-TB). Pelaksanaan program TOSS-TB ini merupakan suatu bentuk pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara (Susanto & Sulistyowati, 2021). Program pelayanan TOSS-TB dibentuk dengan tujuan agar kasus TB di Kota Sukabumi dapat tertangani.

Berlandaskan kebijakan pemerintah (Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis, n.d.), implementasi program TOSS-TB ini dilaksanakan dengan landasan kebijakan tersebut dan menjadi suatu keputusan kebijakan yang diimplementasikan berbentuk program sehingga menghasilkan perubahan sebagaimana yang diinginkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan (Purwanti, Irawati, & Adiwisastro, 2019). Pelaksanaan program TOSS-TB, Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi diamanatkan untuk menjadi puskesmas terdepan dalam melaksanakan program TOSS-TB di Kota Sukabumi yang tercantum dalam (Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Sukabumi Tahun 2021, n.d.)

Peneliti-peneliti lain telah melakukan analisis mengenai implementasi kebijakan program penanggulangan TB di beberapa wilayah Indonesia, diantaranya adalah Kumalasari & Prabawati (2021), yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan TB dengan menggunakan strategi DOTS (*Directly Observed Treatment, Short-course*) di Puskesmas Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto menunjukkan masih belum tepatnya proses pelaksanaan yang dilakukan, sebab koordinasi antar stakeholder lainnya belum cukup satu sama lain sehingga pemecahan masalah mengenai penanggulangan TB masih kurang optimal. Selain itu, implementasi kebijakan Permenkes Nomor

67 Tahun 2016 dalam menanggulangi kasus TB di Kota Yogyakarta, dalam pelaksanaannya belum menghasilkan perubahan yang cukup signifikan karena angka kesembuhan pasien yang masih sangat rendah. Hal ini disebabkan masih minimnya komitmen dan koordinasi antar pemerintah dengan masyarakat dalam mengatasi permasalahan kasus TB di Kota Yogyakarta (Adrian et al., 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini dapat dilihat dari segi lokus penelitian yang dilakukan dimana peneliti saat ini berada di wilayah Kota Sukabumi sedangkan peneliti terdahulu berada di wilayah Kabupaten Mojokerto dan Kota Yogyakarta. Kemudian perbedaan lainnya dilihat dari fokus penelitian, pada penelitian Kumalasari & Prabawati (2021) lebih memfokuskan kepada implementasi penanggulangan TB dengan strategi DOTS, dan penelitian yang dilakukan oleh Adrian et al., (2020) lebih berfokus kepada penanggulangan kasus TB dengan pengimplementasian kebijakan Permenkes Nomor 67 tahun 2016. Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada pengimplementasian program pelayanan TOSS-TB dalam menanggulangi kasus TB di Kota Sukabumi. Berdasarkan rumusan masalah serta perbedaan penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keefektifan implementasi

kebijakan program pelayanan TOSS-TB di Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi sebagai puskesmas terdepan dalam melaksanakan program TOSS-TB di Kota Sukabumi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu maupun sekelompok orang yang dianggap kelompok penting dari suatu permasalahan yang akan diangkat (Craswell, 2016).

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Untuk data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara dengan pemilihan informan secara *purposive sampling*. Mereka yang dijadikan informan adalah yang terkait langsung dengan penyelenggaraan program TOSS-TB, yaitu: ketua pengelola program penanggulangan TB (implementor utama pelaksanaan program TOSS-TB), kepala seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular (koordinator pelaksana program TOSS-TB), kader program TOSS-TB (pihak yang terlibat dalam membantu menjangkau terduga TB), bidang promosi kesehatan (pihak yang terlibat dalam membantu melakukan sosialisasi) dan dua penderita TB yang mendapatkan layanan pengobatan TB di Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi.

Penelitian ini juga menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber merupakan pengujian kredibilitas yang sifatnya menguji keabsahan data ke berbagai sumber informasi, dalam penelitian ini sumber informasi penelitian diperoleh dari pelaksana program TOSS-TB yaitu ketua pengelola program penanggulangan TB, kepala seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, kader program TOSS-TB, bidang promosi kesehatan dan dua Penderita TB sebagai penerima program TOSS-TB Sedangkan untuk triangulasi teknik merupakan pengujian kredibilitas yang sifatnya menguji keabsahan data dengan berbagai teknik, khususnya dalam penelitian ini menggunakan teknik pengecekan data sekunder yang didapatkan dari pengumpulan dokumen-dokumen seperti data penemuan dan penyembuhan kasus TB di wilayah Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi, laporan investigasi kontak TB dan dokumentasi terkait pelaksanaan pelayanan TB (Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi, 2023). Selain itu, analisis data yang dilakukan menggunakan model analisis Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2019) yaitu langkah pertama mereduksi data dengan merangkum, memilih dan membuang hal-hal yang tidak diperlukan kedalam hasil penelitian dan memfokuskan kepada data yang dibutuhkan. Langkah kedua, melakukan penyajian data dengan mengelompokkan data

yang telah direduksi agar data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap proses penelitian dan memudahkan peneliti untuk melakukan langkah ketiga yaitu verifikasi data maupun penarikan suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya Matland (dalam Purwanti et al., 2019) mengungkapkan mengenai keefektifan implementasi kebijakan didalam model matriks Ambiguitas-konflik yang menyatakan bahwa keefektifan implementasi kebijakan pada prinsipnya perlu memiliki prinsip dasar “empat ketepatan” yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan sasaran, dan ketepatan lingkungan.

Sementara itu, Nugroho (2020) mengembangkan pemikiran Matland dengan mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan akan efektif ketika implementasi kebijakan memperhatikan ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses. Adapun dalam penelitian ini, untuk mengukur keefektifan implementasi kebijakan program TOSS-TB di Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan indikator lima ketepatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Nugroho (2020) yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan

target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses, dengan diuraikan sebagai berikut.

Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan dilihat dari sejauh mana perumusan kebijakan yang telah ditetapkan telah sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan, baik dari segi perumusan kebijakan maupun kesesuaian misi kelembagaan (Nugroho, 2020).

Sejak tahun 2017 Kebijakan penanggulangan TB yang termuat dalam Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 ditindaklanjuti dengan terbentuknya program penanggulangan TB yaitu program Temukan, Obati Sampai Sembuh Penderita Tuberkulosis (TOSS-TB). Dalam perumusan kebijakan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 upaya pencegahan penyebaran TB dilakukan dengan upaya promotif dan preventif.

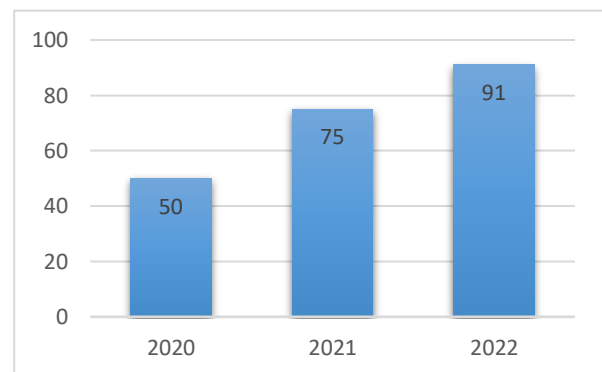
Dalam pelaksanaan promotif Dinas Kesehatan dan Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi melakukan sosialisasi/edukasi yang dilakukan oleh bidang promosi kesehatan (Promkes) mengenai penanggulangan TB. Sedangkan untuk pelaksanaan preventif Dinas Kesehatan dan Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi melakukan penemuan penderita TB, pemeriksaan hingga melakukan pengobatan dan pengawasan dalam proses penyembuhan yang disesuaikan dengan perumusan kebijakan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2).

Kesesuaian organisasi birokrasi yang ada didalam lingkup pelaksana kebijakan dapat menjadi salah satu penentuan keberhasilan implementasi kebijakan (Abraham, 2018). Struktur birokrasi dan SOP penanggulangan TB yang dilaksanakan oleh Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi telah sesuai dengan standar ketenagaan di tingkat kota/kabupaten berdasarkan Kebijakan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 Bab XI mengenai sumber daya manusia program, yang dalam implementasinya terdapat ketua program pelaksana penanggulangan TOSS-TB, dokter, ketua laboratorium, bidang promosi kesehatan serta unsur lain yang memiliki keterkaitan terhadap pelaksanaan penanggulangan TB.

Pengimplementasian kebijakan ini didukung bukan hanya oleh instansi/lembaga kesehatan yang berperan dalam melaksanakan program TOSS-TB, namun Pemerintah Daerah Kota Sukabumi juga terlibat dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pengimplementasian kebijakan program tersebut dengan melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk penanganan TB di Kota Sukabumi. Adanya RAD tersebut bertujuan agar dapat membentuk kerja sama dan kolaborasi dengan instansi/lembaga kesehatan maupun *stakeholder* lainnya yang memiliki fasilitas lebih baik dalam melakukan penanggulangan TB agar penderita TB dapat dengan mudah menjalankan pengobatan terutama penderita

Tuberculosis Resisten Obat (TB-RO) yang saat ini sudah tidak perlu melakukan pengobatannya secara rutin di luar Kota Sukabumi.

Namun setelah berjalannya program pelayanan TOSS-TB dan Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi menjadi puskesmas terdepan dalam pelaksanaan program ini, Kota Sukabumi masih belum bisa menyelesaikan permasalahan terkait kenaikan kasus TB, sebab dari tahun 2020 sampai tahun 2022 masih ditemukan kenaikan kasus TB yang disajikan pada gambar berikut.



Gambar 1. Jumlah kasus TB di Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi tahun 2020-2022 (Sumber: Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi, 2023)

Dari gambar 1 dapat dilihat dari tahun 2020 hingga tahun 2022 kasus TB terus mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan dalam melaksanakan implementasi kebijakan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi belum memberikan pelibatan secara aktif kepada masyarakat terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan TB, padahal di dalam perumusan kebijakan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 yang termuat di dalam Bab XIV

tentang peran serta masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk bisa mengawasi dan memastikan bahwa penderita TB menjalankan pengobatannya sesuai dengan standar kebijakan. Namun menurut Dena (wawancara 1 Maret 2023) dalam implementasi yang dilakukan, pelaksana program TOSS-TB masih menyembunyikan riwayat penyakit penderita TB kepada masyarakat yang membuat pelaksanaan pengecekan dan pengawasan terhadap pengobatan yang dijalankan oleh penderita TB hanya dilakukan oleh petugas medis penanggulangan TB.

Keterbukaan informasi kepada masyarakat pada dasarnya sangat diperlukan sebab secara tidak langsung hal itu akan membuat masyarakat terlibat dalam setiap proses pengimplementasian kebijakan dan akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut (Joko, 2015). Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat terlibat secara aktif untuk bisa melakukan pencegahan dan penanggulangan TB secara optimal guna memutus rantai penyebaran kasus TB di Kota Sukabumi sekaligus membantu para pelaksana program kebijakan untuk bisa menyampaikan pesan kepada anggota masyarakat lainnya tentang bagaimana cara yang aman untuk tetap berinteraksi dengan penderita TB tanpa harus memberikan stigma negatif seperti yang dirumuskan dalam kebijakan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (4).

Berdasarkan hal tersebut, maka pengimplementasian program TOSS-TB masih belum sesuai dengan isi kebijakan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 sebab belum optimalnya keterlibatan secara aktif dari ruang lingkup masyarakat sesuai dengan isi Kebijakan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 yang berdampak kepada masih banyaknya temuan kasus TB di wilayah Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi.

Ketepatan Pelaksanaan

Tepat pelaksanaan dapat dilihat dari aktor pelaksana implementasi kebijakan bukan hanya dari pemerintah atau lembaga pemerintah namun perlu adanya keterlibatan aktor pelaksana lain seperti lembaga swasta, maupun lembaga kemasyarakatan (Nugroho, 2020).

Dalam implementasinya terdapat keterlibatan unsur lain yang masih memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program TOSS-TB seperti adanya kerjasama antara poli anak serta poli umum dan lansia, selain itu terdapat keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yaitu kader STPI-Penabulu yang termuat dalam surat tugas yang di berikan dari Provinsi dengan Nomor.001/08-SKO/SR JABAR PB-STPI/V/2021. Keterlibatan tersebut guna menunjang ketercapaian tujuan terhadap pelaksanaan program TOSS-TB di Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi serta membantu petugas kesehatan penanganan

TB untuk menemukan masyarakat yang terindikasi TB.

Dari segi keterlibatan stakeholder lainnya yaitu terdapat keterlibatan instansi/lembaga kesehatan swasta (rumah sakit swasta, klinik, dan organisasi profesi kesehatan), lembaga jaminan kesehatan, dan lembaga pemerintah lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan program TOSS-TB dengan tujuan untuk bersama-sama bisa mencapai keberhasilan penanggulangan kasus TB di Kota Sukabumi, kerjasama tersebut dibentuk melalui kegiatan *Distrik Public Private Mix* (DPPM) dan Koalisi Organisasi Profesi Tuberkulosis (Kopi TB). Kegiatan ini merupakan langkah untuk melakukan hubungan/kerjasama dengan beberapa stakeholder baik itu dengan instansi/lembaga kesehatan swasta, pelayanan jaminan kesehatan, dan lembaga pemerintah lintas sektor. Namun menurut Tina (wawancara 9 Februari 2023) dalam pelaksanaan program TOSS-TB instansi/lembaga swasta seperti pihak RSI Assyifa, RS Kartika, RS Ridho Galih, klinik bahkan pihak Dokter Praktik Mandiri (DPM) yang sudah terlibat dan masuk kedalam wilayah Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi belum cukup optimal keterlibatannya terutama dalam penemuan terhadap kasus TB di masyarakat, sebab instansi/lembaga swasta tersebut hanya berkontribusi dalam pelaksanaan pengobatannya saja namun tidak terlibat untuk berkordinasi kepada pihak

puskesmas untuk melaporkan penemuan kasus TB.

Belum optimalnya komunikasi dan koordinasi antara pihak puskesmas dengan instansi/lembaga kesehatan swasta menjadikan keterhambatan terhadap proses penemuan kasus TB di masyarakat seperti perumusan kebijakan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 Bab II mengenai target, strategi dan kebijakan penanggulangan TB. Tidak hanya itu, menurut Deti (wawancara 2 maret 2023) masih belum optimalnya komunikasi dan koordinasi antara pihak puskesmas dengan instansi/lembaga kesehatan swasta membuat pihak puskesmas serta kader program TOSS-TB tidak bisa melakukan investigasi kontak erat kepada masyarakat yang terdiagnosis TB dan melakukan pengobatan diluar puskesmas karena tidak adanya laporan dari pihak instansi/lembaga kesehatan swasta sehingga investigasi kontak erat dalam menemukan penularan TB akan terkendala karena tingkat penyebaran penularan di lingkungan tempat tinggal penderita TB sudah melebar luas dan tingkat penularan yang sangat berpotensi tinggi.

Dari pernyataan tersebut maka diperlukan peningkatan komunikasi dan koordinasi antara Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi sebagai pelaksana utama program TOSS-TB dengan instansi/lembaga kesehatan swasta karena kerja sama antar stakeholder terhadap pelaksanaan yang dilakukan berkaitan erat dengan proses

komunikasi dan koordinasi yang terjalin agar implementasi kebijakan program dapat berjalan efektif sebagaimana yang telah ditentukan (Adrian et al., 2020).

Selanjutnya Tresiana & Duadji (2020) juga mengungkapkan bahwa keterlibatan aktor pelaksana lain dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan, maka dari itu keberhasilan implementasi program TOSS-TB selain memang perlu adanya keterlibatan dengan instansi/lembaga kesehatan swasta, lembaga jaminan kesehatan dan lembaga pemerintah lintas sektor diperlukan juga keterlibatan serta dukungan dari lembaga kemasyarakatan agar implementasi kebijakan program TOSS-TB dapat berhasil secara optimal. Namun hingga saat ini masyarakat masih belum begitu terlibat aktif untuk melaksanakan program penanggulangan TB karena sejauh ini pelaksanaan program TOSS-TB hanya dilakukan oleh petugas medis Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi, kader TB, Dinas Kesehatan dan beberapa instansi/lembaga kesehatan lainnya. Oleh sebab itu keterlibatan aktor pelaksana lain selain lembaga pemerintah masih belum cukup optimal untuk membantu menyukseskan ketepatan pelaksanaan kebijakan program TOSS-TB.

Ketepatan Target

Ketepatan target yang dimaksud yaitu tepat dalam tiga bagian yakni target yang

dicapai sesuai dengan perencanaan, target yang dimaksud sudah siap dilaksanakan, dan intervensi dari kebijakan program apakah terdapat kebaruan pelaksanaan terhadap kebijakan program sebelumnya (Nugroho, 2020).

Dalam menanggulangi kasus TB pemerintah telah mengadopsi strategi DOTS yang direkomendasikan oleh WHO sejak tahun 1995 dengan tujuan untuk memutus penularan penyakit TB di masyarakat. Kemudian pada tahun 2017 strategi tersebut dikembangkan menjadi program penanggulangan (TOSS-TB). Pelaksanaan sebuah program membutuhkan perencanaan dan strategi yang baik agar mampu mencapai target yang telah ditetapkan (Faizah & Raharjo, 2019). Dena (wawancara 1 Maret 2023) menyatakan bahwa Program Pelayanan TOSS-TB dibentuk agar strategi DOTS yang telah diadopsi dapat dikembangkan menjadi strategi yang lebih akseleratif agar pengimplementasian dari program ini dapat melibatkan secara aktif seluruh penyedia layanan kesehatan dan stakeholder lainnya dalam menanggulangi kasus TB.

Salah satu hal yang menjadi penentu keberhasilan sebuah program adalah tercapainya ketepatan target yang telah direncanakan, sebab perencanaan target yang tepat dapat memberikan dampak pada suatu organisasi atau instansi (Chomaerah, 2020). Pelaksanaan kebijakan program TOSS-TB

memiliki dua target yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuannya yaitu target penemuan kasus TB dan target penyembuhan kasus TB yang disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1

Capaian target pelaksanaan kebijakan program TOSS-TB di Puskesmas Selabatu tahun 2022

NO	Jenis target	Total Target	Target Terlaksana
1.	Penemuan TB	57 kasus	91 kasus
2.	Penyembuhan TB	120 kasus	95 kasus

Sumber: Data Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi (2023)

Berdasarkan Tabel 1 terkait ketercapaian penemuan kasus TB di wilayah Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi telah melebihi target yang telah ditetapkan sedangkan untuk target penyembuhan kasus TB pihak Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi masih belum mampu untuk melampaui ketercapaian target yang telah ditetapkan. Menurut Tina (wawancara 9 Februari 2023) bahwa tidak optimalnya ketercapaian target penyembuhan dikarenakan terdapat beberapa faktor, baik dari pasien yang tiba-tiba pindah tempat tinggal dan tidak memberikan laporan kepada pihak puskesmas, pasien mengalami dropout hingga meninggal dunia, serta pasien mengalami kejenuhan dalam melakukan pengobatannya.

Namun berdasarkan observasi yang dilakukan, beberapa faktor tersebut terjadi salah satunya karena perencanaan dan strategi pelaksana kebijakan program TOSS-

TB seperti penyebarluasan informasi mengenai penanggulangan TB serta pelaksanaan pelibatan masyarakat secara aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TB masih belum cukup baik dilakukan, padahal penyebarluasan informasi mengenai penanggulangan TB dan pelibatan masyarakat perlu dilakukan karena masalah TB banyak berkaitan dengan masalah pengetahuan dan perilaku masyarakat (Faradis & Indarjo, 2018). Oleh karena itu, belum tepatnya target yang ingin dicapai dalam program TOSS-TB karena dua target yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan program sampai saat ini masih belum bisa tertangani dengan baik dimana target penemuan TB terus meningkat sampai melebihi target yang telah ditetapkan sedangkan target penyembuhan masih belum bisa terpenuhi secara optimal, hal ini juga menjadi sebuah catatan untuk Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi karena antara target penemuan dan target penyembuhan masih belum seimbang satu sama lain dan kasus TB di Kota Sukabumi masih menjadi sebuah kasus yang belum cukup bisa tertangani hingga saat ini.

Ketepatan Lingkungan

Implementasi kebijakan yang tepat dapat dilihat dari pelaksanaan kebijakan yang dilakukan apakah pelaksanaan tersebut sudah

mewakili ruang lingkungannya, baik itu lingkungan internal (mewakili persepsi pihak yang ada diarah lembaga perumus kebijakan dan lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kebijakan) maupun lingkungan eksternal (terinterpretasi kepada ruang lingkup masyarakat) (Nugroho, 2020).

Komunikasi yang efektif antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi dalam melaksanakan program TOSS-TB dapat menciptakan koordinasi yang baik sehingga dapat menghasilkan lingkungan kerja yang mendukung (Inayah & Wahyono, 2019), hal tersebut dapat dilihat dari bentuk pengadaan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) serta keterjalinan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh para lembaga pelaksana.

Dena (wawancara 1 Maret 2023) mengungkapkan bahwa laporan pelaksanaan program TOSS-TB Puskesmas Selabatu semuanya dilakukan sesuai dengan ketentuan SOP kebijakan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016, komunikasi dan koordinasi tersebut disampaikan melalui pelaksanaan pertemuan rutin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dengan ketua Program TOSS-TB Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali. Selain itu, menurut Tina (wawancara 9 Februari 2023) bahwa selain pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, pelaksanaan komunikasi dan koordinasi ini

juga dilakukan dengan lintas unsur pelayanan dalam internal Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi dimana terdapat keterkaitan dari Pelayanan umum, pelayanan anak-anak, dan pelayanan laboratorium yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam internal puskesmas sehingga target penemuan kasus TB di wilayah Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi bisa tercapai dengan baik.

Untuk lingkungan eksternal, Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi sebagai implementor utama telah melakukan kerja sama dengan lintas sektor agar dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program TOSS-TB di ruang lingkup masyarakat. Kerja sama ini dilakukan karena program yang dilaksanakan jika tidak mendapat dukungan yang baik akan memberikan hasil yang kurang maksimal, selain itu kendala yang ada dalam program juga tidak bisa teratasi dengan segera (Faizah & Raharjo, 2019). Pelaksanaan kerja sama ini dilakukan bersama dengan sektor pendidikan dan sektor kawasan permukiman untuk dapat memberikan edukasi dan penjangkaran kesehatan baik mengenai TB maupun mengenai penjangkaran kesehatan lainnya.

Pelaksanaan sosialisasi di Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi juga telah terbentuk sebuah jadwal yang ditetapkan seperti yang ditunjukkan pada gambar 2 sebagai berikut.

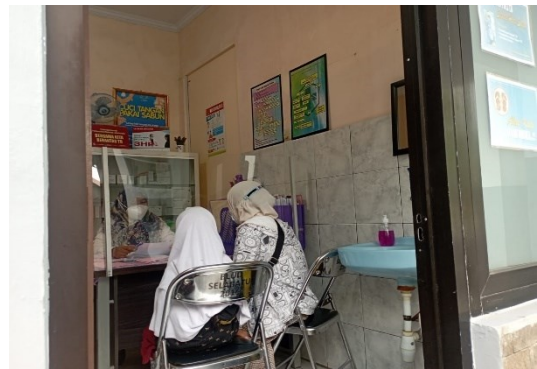
JENIS PELAYANAN	HARI/WAKTU
PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	SENIN-SABTU 08.00-14.00 WIB
PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	SENIN-SABTU 08.00-14.00 WIB
PELAYANAN KESEHATAN KIA DAN KB	SENIN-SABTU 08.00-14.00 WIB
PELAYANAN GIZI	SENIN-SABTU 08.00-14.00 WIB
PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	SENIN-SABTU 08.00-14.00 WIB
PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT	SENIN-SABTU 08.00-14.00 WIB

Hari dan waktu tentatif mengikuti kebijakan Kepala Puskesmas Selabatu

Gambar 2. Jadwal Pelayanan Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi
(Sumber: Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi, 2023)

Gambar 2 menunjukkan bahwa jadwal pelayanan promosi kesehatan dilaksanakan setiap hari senin-sabtu dan dilakukan antara pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00. Menurut Sri (wawancara 8 maret 2023) pelaksanaan pelayanan promosi kesehatan ini bertempat di ruang tunggu pelayanan puskesmas ketika masyarakat ingin melakukan pengobatan, namun pelaksanaan edukasi ini bukan hanya memberikan informasi khusus tentang TB, tetapi terdapat penjelasan edukasi lainnya yang diinformasikan juga oleh tim Promosi Kesehatan seperti penyakit tidak menular, penyakit menular dan beberapa informasi mengenai kesehatan lainnya. Meskipun pelaksanaan pelayanan promosi kesehatan ini telah terbentuk jadwal, hanya saja pelaksanaan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bidang pelayanan Promosi Kesehatan hanya melaksanakan edukasi tersebut ketika mendapatkan arahan tugas dari kepala

puskesmas. Selain itu, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelayanan TOSS-TB sudah disediakan, salah satunya yaitu media informasi mengenai TB hanya saja posisi penempatan media informasi tersebut belum cukup optimal, seperti dalam gambar berikut.



Gambar 3. Penempatan media informasi tentang TB di ruang Poli TB
(Sumber: Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi)

Berdasarkan gambar 3 diketahui bahwa penempatan media informasi mengenai TB hanya di tempatkan dalam ruangan Poli TB. Sedangkan penempatan di ruang lain seperti ruang tunggu pelayanan umum ataupun ruang tunggu pelayanan khusus TB masih belum tersedia seperti gambar dibawah ini.



Gambar 4. Ruang tunggu pelayanan Poli TB Puskesmas Selabatu
(Sumber: Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi)

Belum cukup optimalnya ketersediaan media informasi mengenai penanggulangan TB membuat masyarakat masih menganggap

tidak begitu serius mengenai penularan TB. Selain itu, komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat dalam pemberian edukasi secara khusus mengenai TB hanya ada ketika memperingati Hari TB sedunia yang jatuh setiap tanggal 24 maret. Namun di hari-hari lainnya edukasi yang diberikan hanya dilakukan secara sepintas sehingga masih banyak masyarakat yang tidak paham untuk melakukan pencegahan penularan TB dimana tidak sedikit masyarakat yang sedang terindikasi TB memakai masker hanya saat melakukan pemeriksaan kesehatan.

Dalam melakukan sosialisasi mengenai penanggulangan TB di ruang lingkup masyarakat pelibatan organisasi masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, dan kelompok penting masyarakat termasuk kedalam suatu hal yang diperlukan, sebab untuk mengedukasi masyarakat mengenai TB tidak bisa dilakukan hanya di ruang lingkup puskesmas ketika masyarakat sedang melakukan pengobatan namun perlu adanya edukasi ke ruang lingkup yang lebih luas lagi, dimana hal tersebut perlu adanya dukungan dari pihak organisasi masyarakat agar informasi mengenai TB baik dari penularan, penemuan, penanganan, dan pengobatannya dapat terkomunikasikan dengan baik sampai ke tingkat setiap keluarga. Koordinasi dengan lembaga strategis dirasa perlu dilakukan dalam pelaksanaan penanggulangan TB karena lembaga strategis masyarakat dapat membantu dalam hal

sosialisasi program kepada masyarakat melalui perannya masing-masing (David et al., 2015).

Keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan Program TOSS-TB di Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi dalam menanggulangi TB dapat dikatakan masih belum cukup optimal. Menurut Redita (wawancara 22 februari 2023) bahwa dirahasiakannya riwayat penderita TB kepada masyarakat karena penderita takut akan stigma negatif dari masyarakat dan membuat penderita TB merasa malu ketika harus memberikan informasi bahwa dirinya sedang terindikasi TB. Karena hal tersebut maka sangat diperlukan peningkatan komunikasi kepada masyarakat untuk mengurangi bahkan menghilangkan stigma negatif dari masyarakat mengenai TB. Selain itu, peningkatan komunikasi tersebut agar implementasi kebijakan program TOSS-TB dapat mewakili lingkungan eksternalnya karena masyarakat juga sebagai salah satu stakeholder yang memberikan dampak cukup signifikan terhadap kesuksesan pelaksanaan implementasi penanggulangan TB perlu sepenuhnya sadar dan paham untuk melakukan pencegahan penyebaran TB serta membantu masyarakat yang terindikasi TB untuk bisa menjalankan pengobatannya secara rutin sampai sembuh.

Ketepatan Proses

Keberhasilan sebuah kebijakan mengacu pada suatu proses yaitu proses

pemahaman dan penerimaan publik terutama yang menjadi sasaran program untuk bisa melaksanakan kebijakan demi kepentingan bersama, sedangkan sisi lembaga pemerintah sebagai penyedia program siap melakukan proses pelaksanaan kebijakan sebagai suatu bentuk tanggung jawab (Nugroho, 2020).

Dalam proses pelaksanaan program TOSS-TB di Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi dapat dilihat dari faktor pendukung implementasi program tersebut. Kualitas proses yang dihasilkan dalam pelaksanaan program TOSS-TB didukung oleh kualitas sumber daya manusia memiliki pengetahuan dan pengalaman terhadap penanganan kesehatan. Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi juga telah mempersiapkan dengan baik segala bentuk penanganan penanggulangan TB sesuai dengan SOP kebijakan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 mulai dari penemuan, pemeriksaan hingga pemantauan pengobatan pasien TB.

Pada pelaksanaan kebijakan, ketepatan proses berkaitan dengan tahapan proses kebijakan yang dilakukan secara nyata seperti persiapan sumber daya manusia dengan pemberian pelatihan, ketersediaan peralatan penunjang dan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program kebijakan agar dapat memberikan output dan outcomes yang baik dari proses pelaksanaan program kebijakan dengan nantinya dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat terutama sasaran kebijakan tersebut

(Sutmasa, 2021). Proses pelaksanaan program TOSS-TB di Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi, menurut Tina (wawancara 9 Februari 2023) sarana dan prasarana di Puskesmas Selabatu telah disediakan dengan baik yaitu berupa penyediaan ruangan khusus untuk pelayanan penanganan TB yang disebut sebagai Poli TB. Terdapat Pengadaan obat-obatan yang juga terdata dengan baik, dan adanya pelatihan yang diberikan oleh pihak pengelola program penanggulangan TB kepada tim pelaksana penanggulangan TB yang dilakukan setiap setahun sekali. Sarana dan prasarana tersebut disediakan agar pelaksana kebijakan program TOSS-TB dapat memberikan pelayanan dengan baik lalu pasien yang sedang menjalankan pengobatan TB dapat merasakan pelayanan yang optimal dan tidak mengalami keterlambatan pengobatan serta proses kesembuhan yang sedang dilakukan dapat berjalan dengan semestinya.

Selain tahapan proses pelaksanaan, ketepatan proses pada dasarnya berkaitan juga dengan pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas dimana hal tersebut merupakan amanat dari UU RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang didalamnya mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik agar fungsi-fungsi pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan publik dapat berjalan efektif (Suharyana, 2017). Maka dari itu, ketika terdapat pasien TB yang sudah cukup gawat

dan mengalami resisten obat (TB-RO) maka pengelola program TB Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi memiliki tugas, peran dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada penderita TB dengan melakukan pendampingan pengobatan ke rumah sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung secara berkala sampai pasien TB-RO tersebut benar-benar dinyatakan sembuh seperti yang dijelaskan dalam perumusan Kebijakan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 Bab XI tentang peran sumber daya dalam menanggulangi TB.

Pelaksanaan program TOSS-TB di Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi secara umum telah berjalan dengan baik, hanya saja terdapat beberapa hal yang masih diperlukan perbaikan terutama terhadap pelaksanaan pencegahan penyebaran TB. Pelaksana kebijakan program TOSS-TB memerlukan komunikasi dan koordinasi dengan salah satu rumah sakit khusus penanganan TB seperti Balai Kesehatan Paru masyarakat Cianjur. Diharapkan proses yang dilakukan dalam menanggulangi pencegahan dan penyembuhan TB bisa dilakukan secara optimal sehingga penderita TB bisa mendapatkan pengobatannya secara intensif hingga sembuh. Di sisi lain, masyarakat yang sehat (tidak terindikasi TB) namun berada di lingkungan yang sama dengan penderita TB dapat terlindungi dari penularan TB.

Selain itu, diperlukan pelibatan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan

program TOSS-TB yang harus dapat dimaksimalkan peran *stakeholder* dan lintas sektornya. Hal ini diperlukan karena untuk menyukseskan pelaksanaan program TOSS-TB butuh seseorang yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat dalam mendukung berjalannya program (Probandari et al., 2008). Namun pelaksanaan program TOSS-TB di Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi dalam pelaksanaan investigasi 20 kontak erat TB, petugas medis masih belum melibatkan secara aktif peran *stakeholder* atau lintas sektor seperti kelompok penting masyarakat. Maka dari itu, pelaksanaan investigasi kontak erat TB ini hanya diketahui oleh pihak petugas medis, kader TB dan keluarga inti dari pasien tersebut dengan tetap menyembunyikan riwayat penyakit penderita TB dari lingkungan masyarakat sekitar.

Pelaksanaan investigasi kontak erat hanya diketahui oleh petugas medis dan penderita TB, padahal penyakit TB merupakan sebuah penyakit menular yang sangat membutuhkan kerja sama lintas sektoral dalam penanganannya mulai dari puskesmas, dinas kesehatan, *stakeholder*, masyarakat, tokoh masyarakat, dan peran serta lintas bidang pada fasilitas kesehatan (Prameswari, 2018).

Beberapa hal yang belum optimal dalam proses pengimplementasian program TOSS-TB saat ini adalah kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam

penanggulangan TB yang masih minim. Tidak sedikit masyarakat yang menganggap TB sebagai suatu penyakit memalukan dan mengesampingkan kepentingan pencegahan penularan TB. Masih terdapat penderita TB tidak memakai masker saat berpergian keluar rumah. Keluarga pasien juga tidak mau melakukan *screening* dalam rangka investigasi kontak erat ataupun mengikuti terapi pencegahan TB karena merasa kondisi badannya sehat meskipun salah satu anggota keluarganya terindikasi TB. Maka dari itu, optimalisasi pelaksanaan program TOSS-TB perlu ditingkatkan baik dalam keterlibatan masyarakat maupun pelaksanaan program TOSS-TB.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan implementasi kebijakan program TOSS-TB di Puskesmas Selabatu dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Ketepatan kebijakan implementasi program TOSS-TB di Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi dinilai masih belum dapat menyelesaikan permasalahan terkait penyebaran TB yang masih tinggi dan keterlibatan masyarakat terhadap upaya pencegahan serta penanggulangan TB masih belum sesuai dengan perumusan kebijakan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 Bab XIV tentang peran serta masyarakat sehingga ketepatan

kebijakan terhadap implementasi program TOSS-TB di Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi sudah tepat, namun dalam pelaksanaannya masih kurang optimal.

Kedua, pada ketepatan pelaksanaan program TOSS-TB sudah terdapat keterlibatan aktor pelaksana selain lembaga pemerintah yaitu lembaga swasta dan lembaga masyarakat dengan terbentuk pelaksanaan *Distrik Public Private Mix* (DPPM) dan Koalisi Organisasi Profesi Tuberkulosis (Kopi TB), hanya saja keterlibatan yang telah dilakukan masih belum cukup optimal terutama dalam keterlibatan pencegahan penyebaran kasus TB di wilayah Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi.

Ketiga, ketepatan target di Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi masih belum bisa mencapai tujuan program TOSS-TB karena target penemuan TB terus meningkat sedangkan target penyembuhan TB masih belum bisa memenuhi target yang telah ditetapkan, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor baik itu dari penderita TB, masyarakat maupun pihak pelaksana kebijakan program TOSS-TB.

Keempat, ketepatan lingkungan internal implementasi kebijakan program TOSS-TB di Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi dapat dinilai dari komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi yaitu dari bentuk pengadaan kegiatan monev terhadap laporan

pelaksanaan program TOSS-TB. Terdapat keterkaitan pelayanan dengan lintas unsur pelayanan lainnya untuk meningkatkan komunikasi dalam internal. Namun, untuk penilaian lingkungan eksternal interaksi dengan ruang lingkup masyarakat masih belum cukup optimal sebab dukungan dari organisasi masyarakat masih belum bisa menginterpretasikan program TOSS-TB agar masyarakat mau melakukan pencegahan penyebaran TB dan menghilangkan stigma negatif terhadap penderita TB.

Kelima, ketepatan proses Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi dalam menjalankan proses implementasi kebijakan program TOSS-TB baik dari penemuan, pengobatan dan pemantauan telah sesuai dengan SOP Permenkes Nomor 67 Tahun 2016. Hanya saja proses pelaksanaan tersebut masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti belum adanya koordinasi dengan salah satu rumah sakit khusus penanganan TB serta belum maksimalnya peran *stakeholder* dan lintas sektor dalam menangani TB sehingga sampai saat ini kesadaran dan pemahaman masyarakat masih terbilang minim terhadap pelaksanaan penanggulangan TB.

Rekomendasi

Beberapa saran secara teoritis maupun praktis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Hendaknya melakukan penelitian lanjutan terkait pelaksanaan program TOSS-TB dengan menggunakan variabel lain seperti evaluasi ataupun strategi kebijakan untuk dapat memperluas kajian keilmuan mengenai pelaksanaan program TOSS-TB yang dilaksanakan di Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi.
2. Sebaiknya terdapat kerjasama dengan pihak rumah sakit khusus penanganan TB seperti Balai Kesehatan Paru Masyarakat Cianjur, agar penderita TB bisa melakukan pengobatannya hingga sembuh dan lingkungan di sekitar penderita TB juga dapat terlindungi dari penularan TB.
3. Sebaiknya merahasiakan riwayat penyakit penderita TB dievaluasi kembali karena masyarakat perlu mengetahui adanya penderita TB dilingkungannya bersamaan dengan edukasi tentang cara yang aman untuk tetap berinteraksi dengan penderita TB tanpa harus memberikan stigma negatif, hal ini dilakukan untuk bisa melibatkan secara aktif masyarakat terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan TB sesuai dengan perumusan kebijakan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016.
4. Mengoptimalkan segala bentuk media informasi seperti banner ataupun poster tentang penanggulangan TB yang ditempatkan di ruang strategis seperti

ruang tunggu pelayanan umum maupun ruang tunggu pelayanan khusus penanganan TB.

5. Perlunya peningkatan peran stakeholder dan lintas sektor agar edukasi tentang penanggulangan TB dapat tersampaikan dengan baik dan jelas sehingga kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pencegahan penyebaran serta pemahaman informasi TB dapat tersampaikan sampai ke tingkat setiap keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, R. (2018). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis di Puskesmas Kamonji kota Palu. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(5), 118–123.
- Adhanom, T. (2021). *Global Tuberculosis Report* (1st ed.).
- Adrian, M. M., Purnomo, E. P., & Agustiyara. (2020). The Implementation Of Government Policy: Permenkes No. 67 Tahun 2016 For Tuberculosis Prevention In Yogyakarta City. *Indonesia : JKKI*, 09(02), 83–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkki.55965>
- Chomaerah, S. (2020). Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Puskesmas. *Higeia Journal Of Public Health Research And Development*, 4(3), 398–410. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/higeia.v4i3.37932>
- Craswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (1st ed.). Pustaka Pelajar.
- David, A., Setyawan, B., Rengga, A., Rostyaningsih, D., Profesor, J., & Soedarto, H. (2015). *Implementasi Program Penanggulangan Tuberkulosis Di Kabupaten Semarang Tahun 2013*.
- Faizah, I. L., & Raharjo, B. B. (2019). Penanggulangan Tuberkulosis Paru dengan Strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short course). *Higeia Journal Of Public Health Research And Development*, 3(3), 430–441. <https://doi.org/10.15294/higeia/v3i3/26951>
- Faradis, A. N., & Indarjo, S. (2018). *Implementasi Kebijakan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis*. 307–319. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>
- Friedland, G., Harries, A., & Coetzee, D. (2017). Implementation issues in tuberculosis/HIV program collaboration and integration: 3 Case studies. *Journal of Infectious Diseases*, 196(SUPPL. 1). <https://doi.org/10.1086/518664>
- Inayah, S., & Wahyono, B. (2019). Penanggulangan Tuberkulosis Paru dengan Strategi DOTS. *Higeia Journal Of Public Health Research And Development*, 3(2), 223–233.

- <https://doi.org/10.15294/higeia/v2i3/25499>
- Joko, S. U. (2015). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (apbdes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto). In *Maret* (Vol. 10, Issue 1).
- Kumalasari, F. M., & Prabawati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis Dengan Strategi Directly Observed Treatment Short-Course (DOTS) Di Puskesmas Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto. *Publika, volume 9 n, 201–214*. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p201-214>
- Muhammad, H. (2022). *Sepanjang 2022, Kasus Tuberkulosis di Sukabumi Tembus 1.602 Orang*. REPUBLIKA.Co.Id. <https://www.republika.co.id/berita/rlc7rx380/sepanjang-2022-kasus-tuberkulosis-di-sukabumi-tembus-1602-orang>
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan* (3rd ed.). PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis*. (n.d.).
- Prameswari, A. (2018). The Evaluation of Directly Observed Treatment Short-Course (DOTS) Implementation for TB in Hospital
- X. *Jurnal Medicoeticolegal Dan Manajemen Rumah Sakit*, 7(2). <https://doi.org/10.18196/jmmr.7261>
- Probandari, A., Utarini, A., & Hurtig, A. K. (2008). Achieving quality in the Directly Observed Treatment Short-course (DOTS) strategy implementation process: A challenge for hospital public-private mix in Indonesia. *Global Health Action, 1(1)*. <https://doi.org/10.3402/gha.v1i0.1831>
- Purwanti, D., Irawati, I., & Adiwisastra, J. (2019). The Effectiveness of New Student Admission of Zoning System Policy for Students Prone to Continue Education. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 5, 1–7*. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1737>
- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastra, J., & Becti, H. (2019). Implementation Of New Student Admission Policy Based On Zoning System In Bandung City. *Jurnal Governansi, 5(1), 12–23*.
- Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rlppd) Kota Sukabumi Tahun 2021*. (n.d.).
- Sugiyono, Prof. Dr. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA, cv.
- Suharyana, Y. (2017). Implementasi E-Government Untuk Pelayanan Publik Di Provinsi Banten. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan*

Pembangunan Daerah, 1(1), 45–58.
<https://doi.org/10.37950/jkpd.v1i1.5>

Susanto, H., & Sulistyowati, A. (2021). Efektivitas Pelayanan Pasien Tb Dengan Strategi Directly Observed Treatment Short-Course (Dots) Di Puskesmas Soko Kabupaten Tuban. In *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik* (Vol. 4, Issue 2).

Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36.

Tresiana, N., & Duadji, N. (2020). *Gender equality dan inovasi kebijakan publik: sebuah model inovasi kebijakan perintisan klaster dalam pengembangan industri rumahan perempuan* (Pertama). Graha Ilmu.